

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya ada di urutan teratas di asia tenggara dan urutan ke empat di dunia setelah negara amerika serikat berada di urutan ke tiga. Pada tahun 2016 sensus 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, jumlah penduduk tersebut tersebar ke daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dimana untuk jumlah penduduk di daerah perkotaan 118.320.256 jiwa (49,79 persen) sedangkan di daerah pedesaan 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Sedangkan jika dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Dengan padatnya jumlah penduduk pada suatu negara akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, karena akan kecil pengontrolan terhadap pendidikan serta pengelolaan sumber daya manusianya. Jika dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2016 sensus 2010 jumlah penduduk perempuan tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk laki-laki itu menunjukkan sumber manusia berpotensi seperti halnya laki-laki.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat majunya atau berkembangnya suatu negara atau daerah, kemiskinan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya. Munculnya kemiskinan karena sumber daya manusianya kurang atau tidak berkualitas. Dengan demikian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa diartikan sebagai upaya guna menghapus kemiskinan tersebut. Akan tetapi usaha untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak akan tercapai jika penduduk masih terbelenggu oleh

kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan. Penduduk yang sering menderita kekurangan gizi itu sebagian besar diderita oleh masyarakat miskin, bukan hanya kekurangan gizi saja yang diderita oleh masyarakat miskin, misalnya tingkat buta huruf yang tinggi, tingkat kesehatan yang buruk serta lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses yang menyebar di seluruh wilayah di Indonesia baik diperkotaan maupun di daerah pedesaan.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi di Pulau Jawa Bulan
September Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk miskin kota+desa(Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
DKI JAKARTA	368.67	3.61
JAWA BARAT	4485.65	9.57
JAWA TENGAH	4505.78	13.32
DI YOGYAKARTA	485.56	13.16
JAWA TIMUR	4775.97	12.28
BANTEN	690.67	5.75

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Indonesia 2015

Dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur maka perlu ada perbandingan dengan provinsi lain di pulau jawa meskipun hanya pada tahun 2015 saja. Terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angkanya di atas 10 persen. Pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi jika dibandingkan dengan enam Provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke tiga dari ke enam provinsi yaitu sebesar 12,28%. peringkat ke dua ditempati oleh DI Yogyakarta sebesar 13,16%, sedangkan

untuk peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 13,32%.

Tabel 1.2
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tingkat Kemiskinan Tahun 2015

Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Kabupaten/Kota
0% - 10%	13
11% - 20%	21
21% - 30%	4
31%- 40%	0

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2015

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Terdapat tiga belas kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, tiga belas kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Dengan demikian, usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih belum merata ke seluruh kabupaten/kota. Untuk itu perlu mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk kabupaten/kota dalam mengatasi atau menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.3
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah di Jawa Timur, September 2011 s/d September 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total			
Kota+Desa						
Sept 2011	167.360	60.240	227.600	5 251.45	13.85	-0.42
Sept 2012	179.240	64.540	243.780	4 992.75	13.08	-0.32
Sept 2013	201.680	72.080	273.760	4 893.01	12.73	0.18
Sept 2014	213.040	76.900	289.950	4 748.42	12.28	-0.14
Sept 2015	231.910	84.550	316.460	4 775.97	12.28	-0.06

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Panel Maret 2008-2010 dan Susenas Maret/September 2011-2015

Pertumbuhan penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun ke tahun tidak terlepas dari tingginya garis kemiskinan pada tahun yang bersangkutan. Garis kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan guna memenuhi kebutuhan pangan esensial seperti, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan lainnya. Garis kemiskinan pada tahun 2015 sebesar Rp. 316.460, pada garis kemiskinan di bagi menjadi dua bagian yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan pada tahun 2015 sebesar Rp. 231.910 dan untuk garis non makanan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 84.550.

Di Indonesia ada tiga golongan kemiskinan, yang pertama yaitu masyarakat yang hidup dibawah garis miskin, masyarakat yang hidup tepat di batas garis kemiskinan, dan yang terakhir adalah golongan masyarakat yang hidup di batas garis kemiskinan.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk
2011	37.840.657
2012	38.106.590
2013	38.363.195
2014	38.610.202
2015	38.847.561

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 37.840.657 jiwa, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu mencapai 38.847.561 jiwa.

Ada beberapa indikator majunya suatu pembangunan yang dilakukan oleh negara atau daerah yang salah satunya melihat peningkatan pendapatan perkapita dimana peningkatan pendapatan perkapita itu diartikan sebagai suatu gambaran pertumbuhan ekonomi negara atau daerah dan juga merupakan hasil pembagian antara pendapatan seluruh penduduk suatu daerah dengan jumlah penduduk suatu daerah atau negara yang bersangkutan. Dengan demikian semakin banyak jumlah penduduk yang diiringi dengan kesempatan kerja yang tinggi, pendapatan perkapita juga akan meningkat. Pada negara berkembang kemiskinan merupakan masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi, masih terdapat banyak keluarga miskin yang sudah berusaha untuk menghindari atau keluar dari batas garis kemiskinan akan tetapi masih saja tidak berhasil. Dalam keluarga yang ekonominya lemah memiliki asumsi bahwa dengan banyaknya jumlah anak yang dimiliki maka dapat membantu perekonomian keluarga. Pilihan yang harus diambil ialah saat membiarkan anak-anak dipaksa untuk tidak

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi supaya dapat segera bekerja dan lebih cepat menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan pendidikan yang rendah akan berdampak dimasa akan datang yang akan kesulitan untuk bersaing dalam mencari pekerjaan, dimana lapangan pekerjaan saat ini kenyataannya sebagian besar bergerak disektor formal melakukan penawaran lapangan pekerjaan kriteria pendidikan tertentu sehingga pada akhirnya pendapatan yang diterima oleh keluarga miskin tetap rendah. Kehidupan keluarga miskin merupakan keluarga yang jauh dari kata kecukupan, banyak upaya dilakukan oleh keluarga miskin untuk menghemat pendapatan yang telah diperoleh antara lain dengan penghematan pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga dan pengoptimalan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan keluarga,

Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan professional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan di kemudian hari (Sedarmayanti, 2004).

Tabel 1.5
Pendidikan (penduduk lulusan perguruan tinggi) Sekolah di Jawa
Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi
2011	4,95
2012	5,24
2013	4,99
2014	5,41
2015	5,88

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk lulusan perguruan tinggi di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk lulusan perguruan tinggi sebesar 4,95 persen, sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk lulusan perguruan tinggi meningkat sebesar 5,88 persen.

Ustama (2009) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal terpenting. Kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi dalam masyarakat hanya dapat diperoleh ketika aset berupa modal materil tidak dimiliki. Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan.

Faktor lain dalam menanggulangi kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran adalah cerminan dimana kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pembangunan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

Tabel 1.6
Tingkat Pengangguran di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Pengangguran
2011	5,33
2012	4,09
2013	4,30
2014	4,19
2015	4,47

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2011-2015

Di Jawa Timur tingkat pengangguran bergerak secara naik turun pada berbagai tahun, meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015 menurun. Tabel 1.6 menunjukkan tahun 2011 tingkat pengangguran sebesar 5,33 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen.

Dalam penelitian ini, masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Timur menjadi masalah yang akan diteliti. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tersebut yaitu meliputi, tingkat pengangguran, pendidikan dan jumlah penduduk.

Berangkat dari teori dan penjelasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang determinasi tingkat pengangguran, pendidikan dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan cara :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kajian keilmuan sosial serta memberikan sumbangan pemikiran pada Ilmu Ekonomi makro

khususnya tentang determinasi tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di Jawa Timur

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam memahami determinasi jumlah pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin sehingga dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pandangan untuk melakukan penelitian yang lebih baik.